

Evaluasi dokumen amdal (studi kasus: Analisis mutu dokumen amdal yang telah disetujui di sepuluh kabupaten dan kota

Yenny Lisanova Catherina, author

Deskripsi Dokumen: <https://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=98216&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah AMDAL.

Setelah lebih dari tujuh belas tahun AMDAL berjalan yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, banyak pihak merasa bahwa AMDAL belum menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang berpengalamanannya dan belum memadai SDM komisi penilaian dokumen AMDAL Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sejak awal perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang dihasilkan.

Evaluasi mutu dilakukan dengan uji kriteria mutu dokumen AMDAL (Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, 2002). Pada penelitian ini difokuskan pada uji mutu aspek Konsistensi, Keharusan, dan Relevansi. Tujuan dari uji mutu aspek konsistensi untuk melihat, apakah komponen dampak penting yang tercantum dalam dokumen AMDAL konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA, dan membandingkan komponen dampak penting yang tercantum dalam Bab Prakiraan Dampak Penting dan Bab Evaluasi Dampak dari dokumen AMDAL.

Uji mutu aspek keharusan dilakukan untuk melihat apakah pelingkupan dampak penting yang hasilnya tercantum dalam Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA, telah dilakukan melalui proses konsultasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Keputusan Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, dan apakah pelingkupan telah dilakukan melalui proses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan peusatan dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bapedal No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.

Pada uji mutu keharusan ini juga, akan melihat apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah pada Bab Prakiraan Dampak Penting telah diperkirakan besar dampak (magnitude of impact). Pada bab tersebut, apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditelaah, telah ditetapkan sifat penting dari besar dampak yang timbul dengan mengacu pada Keputusan Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak penting Penggunaan ketiga kriteria uji mutu tersebut (uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi) disebabkan karena ketiga uji tersebut merupakan kriteria-kriteria uji yang paling mendasar dalam studi AMDAL, dan ketiga uji mutu tersebut lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria uji yang lain, atau dengan kata lain ketiga kriteria uji

tersebut tidak diperlukan penilaian yang mempunyai tingkat kepakaran tinggi.

Teknik pengambilan sampel cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berkelompok, yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap I, peneliti menginventarisasi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang telah terbentuk, yaitu ada 86 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Tahap II, dari Komisi Penilai AMDAL yang telah dibentuk, peneliti menyeleksi lagi berapa komisi yang telah menyetujui dokumen AMDAL, tercatat ada 24 Komisi Penilai AMDAL yang dinilai. Tahap III, dari 24 Komisi Penilai AMDAL yang telah menyetujui dokumen AMDAL, kemudian peneliti melakukan penyeleksian Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang ada di Jawa dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota yang berada di Luar Jawa. Dari hasil seleksi ada 4 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten di Jawa dan 10 Komisi Penilai AMDAL di Luar Jawa, dan tahap IV, berdasarkan pertimbangan kelengkapan dokumen AMDAL (Dokumen KA, ANDAL, RKL, BPL) dan berdasarkan minimal pengambilan sampel, penelitian representatif menurut Chouhnan adalah 30%, maka peneliti mengambil secara acak 5 dokumen AMDAL yang dinilai Komisi Penilai AMDAL di Jawa dan 5 dokumen AMDAL yang dinilai Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota di Luar Jawa. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi terhadap mutu ke-10 dokumen AMDAL yang telah disetujui tersebut dengan uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi). Kemudian hasil uji tersebut dianalisis apakah sudah sesuai dengan mutu tersebut.

Hasil analisis diforwardkan menjadi bahan rekomendasi ke pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah perbaikan, baik pada tatanan kebijakan. Hasil uji mutu aspek relevansi terhadap ke-10 dokumen yang telah disetujui, terdapat hanya 4 dokumen yang memenuhi uji. Dokumen tersebut adalah Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Terminal Purwokerto, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Banyumas; Dokumen AMDAL Kegiatan Penambangan Pasir Laut PT. Perrnata General Utama, Kabupaten Perairan Barat Laut Pulau Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Riau; Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Umum Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Bontang; Dan Dokumen AMDAL Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogor.

Hasil uji Pembobotan, yakni menilai dokumen AMDAL berdasarkan uji aspek konsisten, keharusan dan relevansi. Hasil uji memperlihatkan bahwa ke-10 dokumen AMDAL yang diuji tersebut, tidak dapat satupun dari dokumen-dokumen tersebut yang memenuhi ke-3 uji mutu, baik uji mutu aspek konsistensi maupun uji mutu aspek keharusan dan uji mutu aspek relevansi secara lengkap. Rendahnya mutu dokumen AMDAL dipengaruhi banyak faktor. Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, yaitu konsultan atau pemrakarsa pada umumnya belum menaati dan melaksanakan masukan/saran perbaikan dari anggota komisi penilai AMDAL. Staf penyelenggara AMDAL kurang eennat dalam mengoreksi kembali dokumen AMDAL. Belum melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak dalam sidang komisi secara aktif.

<hr>

In the frame work of minimizing environmental degradation caused by development, a sustainable development which is orientea to nvironmental concept needs to be implemented. One of environmental

management: instruments to achieve it is Environmental Impacts Assessment (AMDAL).

After AMDAL has been implemented for more than 17 years or since Government Regulation number 29/1986 has been enacted, a lot of parties think that AMDAL has not been an effective instrument yet to prevent and control the impact on environment of regency levels, namely 48 AMDAL documents. There's concern about the quality of AMDAL documents, since the members of regional commission of assessment don't have much experience. Therefore, starting from the beginning, the AMDAL documents produced need to be evaluated.

The evaluation is done on the criteria test of AMDAL documents (Deputy Assistant for Environmental Impact Assessment, 2002). This research is focused on test of quality of consistency, necessity, and relevance. The writer takes cluster random sampling carried out in several stages. In the first stage, the writer inventories the existence of 86 regional commission of assessment. In the second stage, the writer selects more committees who have approved the AMDAL documents. There are 24 committees. In the third stage the writer selects a regional commission of assessment whether coming from Java or outside Java Island out of 24 committees who have approved the AMDAL documents. The completeness of documents, such as framework of reference (KA), a study of environmental impacts (AMDAL), an environmental management plan (RKL) and an environmental monitoring plan (RPL) are also taken into consideration.

The result of selection process is there are 14 regional commissions of assessment from Java and 10 regional commissions of assessment from outside Java. In the fourth stage, the writer takes at random 5 AMDAL documents assessed by a regional commission of assessment from Java and 5 AMDAL documents assessed by a regional commissions of assessment from outside Java Island. The writer evaluates all the 10 documents focusing on the aspects of consistency, necessity and relevance.

Then these test results are analyzed whether the documents are in accordance those quality or not. The results of analysis are expected to be the recommendation points for those who will make improvement, whether on the policy technical matters to promote the quality of AMDAL documents in the years to come.